

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID  
BERDASARKAN PSAK NO. 45  
(STUDI PADA MASJID RAYA MAKASSAR)**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



**Diajukan oleh :**

**ADRIANSYAH RAMADHAN**

**2015221924**

**KONSENTRASI AKUNTANSI KOORPORASI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
NOBEL INDONESIA  
MAKASSAR  
2019**

## ABSTRACT

*Adriansyah Ramadhan. 2019. The Accountability of Mosque Financial Management Based on PSAK Items 45 at Makassar Grand Mosque, supervised by Indrawan Azis.*

*This research aims to investigate the accountability of financial management of Makassar Grand Mosque which applies PSAK Items 45.*

*This research uses descriptive qualitative method, specifically by conducting observations, interviews and literature studies with the stages of analysis explicitly data collection, data reduction, data triangulation, and conclusion drawing.*

*The results of this research indicate that mosque administrators have managed finances openly as the form of accountability or financial accountability of the mosque by recording cash receipts and disbursements. Financial management is well recorded even though it is still simple. Regarding PSAK items 45, mosque administrators have not been registered according to PSAK items 45 because the standard was acknowledged cause having never been heard and introduced to the mosque administrators.*

**Keywords:** *Accountability, Financial Management, Non-Profit, PSAK Items 45*

## ABSTRAK

**Adriansyah Ramadhan. 2019.** Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No. 45 pada Masjid Raya Makassar, pembimbing Indrawan Azis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Raya Makassar yang menerapkan PSAK No. 45.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka dengan tahapan analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus masjid telah mengelola keuangan dengan terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan masjid dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih sederhana. Terkait PSAK 45, pengurus masjid belum melakukan pencatatan berdasarkan PSAK No. 45 dikarenakan standar tersebut diakui belum pernah didengar dan diperkenalkan pada pengurus masjid.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Nirlaba, PSAK No. 45

## **MOTTO**

**DAHULUKAN IBUMU!**

**BAHAGIAKAN IBUMU!**

**UTAMAKAN IBUMU!**

**#DOAIBU**

**(PENULIS)**

“Dari Abi Darda r.a. berkata, saya mendengar Rasuluullah Saw. Bersabda: “ Bagi siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya (memayungkan sayapnya) kepada penuntut ilmu karena senang (rela) dengan yang ia tuntut.” (HR. Ibn Majah)”

“Bermimpilah setinggi langit apabila anda terjatuh, anda akan jatuh dianta bintang-bintang” (Bung Karno)

# **PERSEMBAHAN**

**Dengan Penuh Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT.**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :**

**Kedua Orang Tua Saya**

**Saudara-Saudara Saya**

**Sahabat-Sahabat Saya**

**Teman-Teman Saya**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No. 45 pada Masjid Raya Makassar” ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi pada STIE Nobel Indonesia Makassar.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak menemui kendala, tetapi berkat dukungan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis, akhirnya skripsi ini selesai sesuai target yang penulis tentukan. Motivasi dan doa merupakan faktor utama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Ananda Ramadhan dan Ibu Nurlinah S.Pdi.,S,Pd.
2. Bapak Dr. H Mashur Razak, SE., M.M. selaku Ketua STIE Nobel Indonesia yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian.
3. Bapak Indrawan Azis, SE., M.Ak. selaku Pembimbing sekaligus ketua jurusan yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis.
4. Ibu Firiani Latief, SP., M.M. selaku Ketua P3M yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
5. Pengelola Masjid Raya Makassar

6. Bapak/Ibu dosen yang telah begitu tulus membekali penulis dengan ilmu yang sangat berharha.
7. Riska Eka Sary yang memberikan motivasi dan mempengaruhi seluruh mood penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Parakang Saribattanku yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Teman-teman Akuntansi 2015 STIE Nobel Indonesia Makassar, Posko 20 desa swatani, Akuntansi 2015 kelas siang.
10. Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang memberikan wadah kepada penulis untuk berproses dalam dinamika perkuliahan.
11. UKM Nobel Art yang mengajarkan seni untuk berekspresi
12. Badan Eksekutif Mahasiswa & Dewan Perwakilan Mahasiswa yang senantiasa mengayomi kegiatan lembaga kemahasiswaan.
13. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini dan menyerahkan kepada Allah SWT, agar segala bantuan yang penulis terima dari seluruh pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Makassar, 16 Februari 2019

penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACK .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Pengertian Akuntansi .....	10
2.2 Prinsip Akuntansi.....	13
2.2.1 Pengertian Prinsip Akuntansi.....	13
2.2.2 Penggolongan Prinsip Akuntansi .....	14
2.3 Pengertian Masjid .....	15

2.4	Akuntansi Sektor Publik .....	20
2.5	Konsep Akuntabilitas .....	21
2.5.1	Definisi Akuntabilitas .....	21
2.5.2	Akuntabilitas dalam Prespektif Barat.....	24
2.5.3	Akuntabilitas dalam Prespektif Islam .....	25
2.6	Organisasi Nirlaba .....	27
2.7	L. Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK 45 .....	29
2.8	Pengelolaan Keuangan Masjid.....	31
2.9	Penelitian Terdahulu .....	33
2.10	Kerangka Konseptual.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		37
3.1.	Lokasi dan Waktu.....	37
3.2.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4.	Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1.	Gambaran umum tempat penelitian.....	41
4.1.1	Profil Masjid Raya Makassar.....	41
4.1.2	Sejarah Masjid Raya Makassar.....	42
4.1.3	Arsitektur Masjid Raya Makassar .....	44
4.1.4	Al-qur'an Raksasa di Masjid Raya Makassar.....	46
4.1.5	Struktur Pengelola Masjid Raya Makassar.....	48
4.1.6	Uraian Kaerja Dalam Struktur Organisasi.....	49

4.2. Deskripsi Data .....	56
4.2.1 Deskripsi Informan .....	56
4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
4.3 Pembahasan .....	66
BAB V PENUTUP .....	68
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN.....	
DOKUMENTASI .....	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 4.2 Struktur Pengelola Masjid Raya Makassar .....	48

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jumlah Anggota Majelis Pengelola Harian (MPH) .....	55
Tabel 4.2 Laporan Mingguan Keuangan Masjid .....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Contoh Laporan Posisi Keuangan .....	
Lampiran 2 Contoh Laporan Aktivitas .....	
Lampiran 3 Contoh Laporan Arus Kas .....	
Lampiran 4 Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan .....	
Lampiran 5 Susunan Organisasi dan Personalia Majelis Pengelola Harian (MPH) Masjid Raya Makassar.....	
Lampiran 6 Informan dan Jadwal Pelaksana Wawancara .....	
Lampiran 7 Pedoman Wawancara .....	
Lampiran 8 Data Profil Teknis Masjid Raya .....	
Lampiran 9 Panitia Awal Pembangunan.....	
Lampiran 10 Panitia Pemugaran Masjid.....	
Lampiran 11 Panitia Rehabilitasi Masjid.....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masjid merupakan tempat ibadah bagi ummat muslim yang merupakan kewajiban untuk melaksanakan sholat setiap lima kali sehari semalam. Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat yang secara tidak langsung memerlukan ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (*takmir*) juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid dan, 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid. Hal ini bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada para pengurus dan jamaah masjid.

Berkaitan dengan akuntansi, Islam sudah menerapkannya pada masa Rasulullah SAW seperti perhitungan zakat, utang, pencatatan uang masuk dan keluar dalam perdagangan hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat : 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

*jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282 mencerminkan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah yang baru dan penting digunakan untuk menjadikan kegiatan keagamaan menjadi lebih baik seperti di tempat ibadah (Masjid) dan pasar perdagangan. Akuntansi dalam entitas tempat ibadah (Masjid) pencatatan laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur kinerja para pengurus masjid selaku Takmir dan Bendahara Masjid (Hanafi: 2015).

Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan *cash basis* yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode *cash basis* tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi dengan *accrual basis* dianggap lebih baik daripada *cash basis* karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan.

Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*) dengan alasan lebih praktis dan mudah. Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian dilaporkan dan dievaluasi dalam periode waktu tertentu. Penggunaan *single entry method* tidak lagi tepat untuk diterapkan karena tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif, maka penggunaan *single entry method* dengan alasan kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Dan sebaliknya, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem *double entry* mampu menghasilkan laporan keuangan yang *auditable* dan *traceable*. Sistem

pelaporan keuangan pada masjid masih berbentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Biasanya hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar. Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk proses pertanggungjawaban kepada para jama'ah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansinya suatu laporan keuangan (Andarsari: 2016:148).

Kemakmuran masjid merupakan suatu cerminan akuntabilitas masjid (Sucipto 2014). Masjid sejatinya bukan hanya tempat untuk beribadah (Mohamed *et al.* 2014). Dalam sejarahnya masyarakat menggunakan masjid sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan kegiatan peribadatan dan kemasyarakatan. Masjid dapat dikelompokkan sebagai organisasi *non profit*, yaitu suatu organisasi tempat berkumpulnya anggota masyarakat dalam melakukan interaksi, membangun suatu hubungan dan kepercayaan (Attouni dan Mustaffa 2014). Sebagai suatu organisasi *non profit*, masjid tidak berorientasi untuk memperoleh laba. Masjid dibangun oleh suatu komunitas dan masyarakat tertentu sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan, baik pelayanan spiritual maupun material (Sucipto 2014, Payer-Langthaler dan Hiebl 2013).

Kinerja mesjid diukur dari sudut pandang *stake-holder* (Harrison dan Rouse 2012), yaitu seberapa baik masjid memberikan pelayanan terhadap jamaah dan masyarakat, bukan dari kemampuan masjid mengumpulkan donasi yang direfleksikan melalui angka-angka moneter (Baker 2014, Gibbon 2012, Najam 2002). Beberapa penelitian menekankan bahwa suatu organisasi *non profit* seharusnya mengutamakan akuntabilitas kepada pihak *beneficiari* (penerima

manfaat) (Andrews 2014, Kilby 2006, Taylor *et al.* 2014), sehingga dalam konteks masjid dapat dikatakan bahwa jamaah dan masyarakat di sekitar masjid merupakan pihak *beneficiari* yang harus memperoleh pelayanan masjid.

Terdapat berbagai jenis organisasi di Indonesia, salah satunya adalah organisasi nirlaba atau biasa disebut organisasi non profit. Keberadaan organisasi nirlaba semakin banyak di lingkungan sekitar kita. Sujarweni (2015) menyatakan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tujuannya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Dalam PSAK 45 disebutkan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Seperti jenis organisasi lain, pada organisasi nirlaba juga dituntut untuk dapat menyajikan laporan secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dana yang diperoleh pada organisasi nirlaba berupa sumbangan dari donatur. Dimana para donatur tersebut juga berharap dana yang disumbangkan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Performa pada organisasi *non profit* memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas, dimana suatu organisasi *non profit* memiliki performa yang baik jika dapat bersikap akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Harrison dan Rouse 2012). Dalam konteks masjid, performa masjid dilihat dari aktifnya kegiatan masjid yang melibatkan jamaah dan masyarakat (Sucipto, 2014).

Menurut Sucipto (2014) masjid akan *sustainable* jika menggunakan konsep “Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid”. Konsep ini memiliki makna bahwa kemakmuran masjid tidak akan tercapai melalui hubungan satu arah dari pengurus kepada masyarakat saja. Namun hubungan dua arah antara pengurus dan masyarakat merupakan kunci dari kemakmuran masjid. Dengan kata lain, kemakmuran masjid dan kemakmuran masyarakat harus berjalan secara berdampingan.

Fenomena yang terjadi tentang penggelapan dana masjid hingga kini masih saja diperbincangkan. Masih hangat kasus bendahara takmir masjid Al Ghuroba Pakuwon Mall Surabaya yang menggelapkan dana infak sebesar Rp.266.000.000,-. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penggelapan dana (SindoNews.com, 2018). Segala bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut didasari tidak adanya Akuntabilitas dan Transparansi dari pengelola masjid tersebut yang kemudian tidak menerapkan standar PSAK No.45.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Pada Masjid Raya Makassar)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu “Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pengelola Masjid Raya Makassar berdasarkan PSAK No.45?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pengurus Masjid Raya Makassar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

### **a. Teoritis**

Memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap kualitas laopran keuangan pada Masjid sebagai Organisasi Nirlaba dan untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi yang mendukung pengembangan penelitian terkait

**b. Praktis**

## 1) Bagi pihak pengelola

Menjadi acuan dalam melakukan proses penyusunan serta dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba yang relevan dan handal.

## 2) Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini akan memperkaya pengalaman peneliti dalam penerapan teori akuntansi khususnya dalam bidang laporan berdasarkan akuntansi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Akuntansi**

Ada beberapa defenisi atau pengertian akuntansi yang berasal dari berbagai lembaga dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Salah satunya adalah pengertian dan penjelasan yang dikemukakan oleh *Accounting Principle Board* (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.”

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat diketahui atau dikenal bahwa:

1. Fungsi (*peran*) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.
3. Cabang – cabang akuntansi cukup banyak, salah satunya adalah akuntansi pemerintahan.

Yang perlu diketahui dari definisi di atas adalah “*entitas*” ekonomi. Entitas adalah “satuan” yang dapat berarti satuan organisasi, misalnya organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan, dan lain-lainnya. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non-profit dikenal dengan akuntansi sektor publik. Oleh sebab pemerintah daerah merupakan suatu satuan organisasi yang non-profit maka dapat dipahami akan adanya akuntansi untuk pemerintahan daerah, dan akan termasuk dalam kelompok akuntansi sektor public (Halim, 2002).

Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informannya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis.

Dari definisi tersebut ada beberapa istilah pokok yang perlu diperhatikan:

1. Seragam melalui prosedur atau urutan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu aturan yang ditetapkan terlebih dahulu untuk menangani transaksi yang terjadi berulang-ulang.

2. Identifikasi. Melalui proses akuntansi kejadian-kejadian ekonomi dikenali karakteristiknya dan dikenali pengaruhnya terhadap kekayaan, utang, dan modal, serta pendapatan dan biaya.
3. Mencatat atau mererekam. Berdasarkan hasil identifikasi atas peristiwa ekonomi yang sudah terjadi selanjutnya dilakukan pencatatan untuk merekam transaksi tersebut dalam sistem yang sudah disediakan.
4. Menafsirkan. Jika transaksi ekonomi sudah dicatat, dan sudah dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk laporan keuangan, maka secara sistematis akumulasi atau kumpulan tiap kelompok transaksi dapat memberikan makna untuk ditafsirkan.
5. Komunikasi. Proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan rincian dan jumlah kekayaan, utang, modal pada akhir periode akuntansi. Selain itu, proses akuntansi juga menghasilkan laporan tentang jumlah pendapatan, biaya dan laba selama satu periode akuntansi.
6. Peristiwa ekonomi. Yang dimaksud dengan peristiwa ekonomi adalah setiap kejadian yang mengaruhi kekayaan, utang, modal, pendapatan, atau biaya perusahaan. Dalam ilmu akuntansi peristiwa ekonomi ini sering dikenal dengan istilah transaksi.
7. Organisasi. Yang termasuk dalam kategori organisasi adalah perusahaan, organisasi pemerintah, organisasi sosial, dan organisasi lain yang sehari-harinya mengelola keuangan. Namun, selain organisasi formal, individu perorangan dapat saja mengorganisasi kegiatannya dan kemudian

menyelenggarakan akuntansi untuk mengomunikasikan informasi keuangannya dengan pihak lain (Samryn, 2014).

## **2.2.Prinsip Akuntansi**

### **2.2.1 Pengertian Prinsip Akuntansi**

Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang memberikan pandangan secara berbeda tentang apa saja yang termasuk sebagai prinsip dasar akuntansi (Hery, 2011).

Jika manajemen suatu perusahaan dapat mencatat dan melaporkan data keuangan yang dirasa sesuai untuk mereka, maka perbandingan laporan keuangan antarperusahaan akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, akuntan keuangan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam menyiapkan laporan keuangan. Di Indonesia, prinsip ini dikenal sebagai prinsip akuntansi berterima Umum (PABU) yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *generally accepted accounting principles (GAAP)*. Sebagai buku akuntansi menggunakan istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum, prinsip akuntansi yang diterimah umum umum, atau prinsip akuntansi lazim. PABU

memungkinkan investor dan para pemangku kepentingan untuk membandingkan laporan keuangan antarperusahaan. (James, et al, 2009).

Profesi akuntansi telah menciptakan seperangkat standar dan aturan yang diakui secara umum sebagai pedoman dalam pelaporan akuntansi, yang dinamakan prinsip akuntansi yang berterima secara umum ( *general accepted accounting principles, GAAP* ) (Wibowo, 2004).

### **2.2.2 Penggolongan Prinsip Akuntansi**

Terdapat beberapa prinsip-prinsip akuntansi sebagai berikut:

1. Kontinuitas usaha (*going concern*) adalah kesinambungan usaha. Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa yang akan datang
2. Kesatuan usaha (*business entity*). Konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya
3. Periode akuntansi (*Accounting periode*), adalah kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun per periode pelaporan.
4. Kesatuan pengukuran (*measurent unit*). Konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang ( dalam artian mata uang yang digunakan adalah dari negara tempat perusahaan berdiri)

5. Bukti yang objektif (*objektif evidence*) informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi dikatakan objektif apabila informasi dapat diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada
6. Pengungkapan sepenuhnya (*full disclosure*). Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai
7. Konsistensi (*consistency*). Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode yang lain agar laporan keuangan dapat diperbandingkan
8. Realisasi (*matching expense with revenue*). Prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba -rugi periode berjalan (Bahri, 2016).

### **2.3.Pengertian Masjid**

Kata masjid berasal dari bahasa Arab *sajada-yasjudu-sujuudan*, yang berarti sujud menundukkan kepala sampai ketanah. Dari kata *sajada* kemudian terbentuk kata *masjid* (jamak: *masajid*) yang artinya tempat sujud. Pengertian tempat sujud di sini tidak mengacu pada bangunannya-beratap atau tidak, berbatas atau tidak- yang pokok adalah tempat sujud. Ada juga yang menghubungkan kata *sajada* itu dengan tunduk atau patuh sehingga masjid pada hakikatnya adalah tempat untuk

melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah semata.

Namun, dalam kenyataannya, masjid tidak hanya tempat bersujud, tetapi juga tempat kaum muslim melaksanakan berbagai aktivitas lainnya, seperti pendidikan, dakwa, dan budaya Islam. Pada bangunan masjid tertentu selain ruang utama yang berfungsi sebagai tempat shalat, terdapat juga ruang pertemuan (aula), kantor pengurus dewan kemakmuran masjid (DKM), perpustakaan, bahkan ruang kuliah, seperti di Masjid Syuhada, Yogyakarta. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidun (Abu Bakar, Umat bin Khattab, Utsman bin Afan, dan Ali bin Abi Thalib) masjid berfungsi sebagai tempat mengendalikan pemerintahan negara, termasuk menyusun strategi perang.

Dalam perkembangannya kemudian, pengertian masjid menjadi lebih spesifik, yaitu sebuah bangunan atau gedung atau lingkungan yang ditembok yang dipergunakan sebagai tempat mengerjakan shalat, baik shalat lima waktu maupun shalat Jum'at atau shalat hari raya. Pengertian masjid sebagai suatu bangunan merupakan wujud atau aspek fisik dari kebudayaan Islam.

Di Indonesia kata masjid dilafalkan berbeda-beda, seperti *mesigit* (Aceh), dan *mesigi* (Jawa Barat), *meuseugit* (Aceh), dan *mesigi* (Sulawesi Selatan). Tidak hanya itu, ada penamaan tersendiri untuk bangunan masjid atau bangunan tempat shalat yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak dipakai untuk shalat Jumat, yaitu musala-dengan berbagai nama atau sebutan, seperti *meunasah* (Aceh), *surau* (Minang), *langgar* (Jawa), *tajung* (Sunda), *suro* atau *mandersa*

(Batak), dan *santren* (Lombok). Dalam khazanah kebudayaan Islam dikenal istilah *mashad* (masjid-makam), yaitu masjid yang dibangun di kompleks makam; dan masjid-madrasah (masjid-pesantren), yaitu masjid yang dibangun di kompleks pesantren. Di Iran dan India dikenal *idghah*, bahasa Persia untuk menyebut musallah atau tempat salat terbuka, biasanya dipergunakan untuk shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Meskipun bentuk konkret bangunan masjid tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis, terdapat perintah untuk membangun masjid sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi yang artinya: Rasulullah menyuruh kepada kita agar membangun masjid di rumah kita dan ia memerintahkan agar kita selalu membersihkannya. Selain itu, agama Islam mengajarkan bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Menurut sebuah hadis, pahala salat berjamaah 27 derajat (27 kali lipat) dibandingkan salat sendirian. Oleh karena itu, untuk keperluan tersebut, dirasa perlu mendirikan sebuah bangunan, di dalamnya jemaah melakukan salat, terbebas dari gangguan alam (panas dan hujan) dan lingkungan sekitarnya yang dapat mengurangi kekhusyukan salat. Bangunan inilah yang kemudian disebut masjid (Setiawan, 2010).

Dalam sejarah dan perkembangan masjid semenjak zaman Rasulullah sampai saat ini, ternyata eksistensi masjid menduduki posisi penting untuk pembinaan dan persatuan umat Islam. Menurut Said (2011), masjid juga menjadi

lambang kebanggaan kebudayaan Islam, sehingga berdirilah masjid dengan berbagai macam ragam arsitekturnya, diantaranya:

#### 1. Masjid Negara

Masjid negara merupakan masjid terbesar di sebuah negara yang menjadi kebanggan bagi negara dan warganya. Masjid ini statusnya berada di bawah pemerintah pusat, seperti Masjid Istiqlal di Jakarta. Masjid ini digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan yang bernuansa Islami, seperti memperingati hari besar Islam.

#### 2. Masjid Nasional

Masjid ini berada di ibu kota provinsi, tetapi mendapatkan legalitas dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai masjid nasional. Seluruh anggaran biaya masjid adalah tanggung jawab pemerintah provinsi atau gubernur. Contoh masjid ini ialah masjid Baiturrahman di Banda Aceh.

#### 3. Masjid Provinsi

Masjid ini statusnya berada di bawah pemerintah provinsi yang diajukan oleh kantor wilayah kementerian agama kepada gubernur. Masjid ini dinamakan “Masjid Raya” yang anggaran biayanya dari APBD provinsi.

#### 4. Masjid Kabupaten/Kota

Masjid ini statusnya berada di bawah pemerintah kabupaten/kota yang diajukan melalui kantor kementerian agama kabupaten/kota setempat kepada

bupati/walikota. Masjid ini diberi nama “Masjid Agung” dan anggaran biayanya berasal dari APBD kabupaten/kota.

#### 5. Masjid Kecamatan

Masjid ini berada di bawah pemerintah tingkat kecamatan melalui usulan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat kepada camat dengan nama “Masjid Besar”.

#### 6. Masjid Nagari

Masjid ini berada di bawah pemerintahan tingkat nagari. Masjid ini bernama “Masjid Jamik”. Seluruh pembiayaannya berasal dari masyarakat nagari.

#### 7. Masjid Kampus

Masjid kampus adalah masjid yang berada dalam sebuah kampus. Kebanyakan jemaahnya ialah para mahasiswa dan dosen, tetapi bukan berarti tidak ada jemaahnya yang datang dari luar kampus.

#### 8. Masjid Kantor

Masjid kantor ialah masjid yang berada dalam lingkungan sebuah kantor atau perkantoran. Kebanyakan jemaahnya ialah para pegawai kantor tersebut, tetapi bukan berarti tidak boleh yang dari luar kantor untuk jadi jemaahnya. Contoh masjid ini ialah Masjid Bank Nagari Padang.

#### **2.4. Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, hal ini meliputi teknik dan analisis akuntansi yang digunakan oleh masing-masing organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik juga berkaitan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Menurut Bastian (2010:3) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik menurut (Bastian, 2010:4) meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama yakni: (a) akuntansi pemerintah pusat, (b) akuntansi pemerintah daerah, (c) akuntansi partai politik, (d) akuntansi LSM, (e) akuntansi yayasan, (f) akuntansi pendidikan, (g) akuntansi kesehatan, (h) akuntansi tempat peribadatan.

## 2.5. Konsep Akuntabilitas

### 2.5.1 Definisi Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu “*accountability*” yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan sebuah perilaku individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka melalui pemberian alasan atas tindakan tersebut. Akuntabilitas membawa konsekuensi bahwa setiap individu atau organisasi wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagai wujud akuntabilitas individu atau organisasi (Sinclair, 1995 dalam Randa dan Daromes 2014). Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Simbolon (2006), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas juga bisa dikatakan berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan suatu organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing/kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Pada aspek spiritual, akuntabilitas memiliki makna bahwa individu atau organisasi mempunyai kesadaran untuk menyatakan akuntabilitas kepada yang sifatnya transenden, yaitu tuhan seperti yang dinyatakan oleh Jacobs dan Walker (2004) dalam mengungkapkan model akuntabilitas organisasi IONA. Organisasi tersebut menyatakan mengikuti akuntabilitas yang menjadi ajaran organisasi gereja. Akuntabilitas spiritual ini menjiwai setiap individu untuk bertindak dalam menghayati nilai-nilai spiritual yang diyakini dan diwujudkan dalam perilaku setiap individu sebagai anggota maupun sebagai pemimpin globalisasi.

Pendapat lainnya diungkapkan oleh Parker dan Gould (2000) dalam Randa dan Daromes (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas juga berhubungan dengan konsep kejujuran dan etika. Refleksi ini menunjukkan

bahwa akuntabilitas juga menyentuh aspek-aspek nurani setiap individu yakni tidak hanya menjalankan ritual-ritual belaka tetapi muncul ke permukaan sebagai hasil dari proses perenungan. Dengan melibatkan hati nurani yang mendalam, maka setiap individu atau organisasi akan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan etika yang menjadi anggukan universal untuk diperjuangkan dan diwujudkan dalam aktivitas setiap individu atau organisasi. Akuntabilitas merupakan sebuah komitmen dua pihak, yaitu pihak pemberi dan penerima. Sebagai contoh dalam penyaluran dana bantuan, ada komitmen dari donatur untuk memberikan dana hanya jika diimbangi oleh komitmen dari penerima donasi untuk melaksanakan apa yang dijanjikan kepada pemberi dana.

Perumusan akuntabilitas menjadi suatu konsep teori dalam bidang akuntansi dilakukan lewat teori *stakeholders* dan teori agensi. Sebuah pemikiran bahwa akuntabilitas tidak hanya penting secara moral dan teoritis, namun juga secara praktik. Perjanjian akan disepakati dengan pihak lain jika agen bertindak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Komitmen untuk menjalankan perjanjian yang telah disepakati sering tidak dilakukan sehingga beberapa literatur dalam bidang akuntansi yang diangkat menjadi dalil atau teori menyatakan bahwa hubungan kedua pihak ini sering asimetris.

### 2.5.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Barat

Dalam perspektif barat atau *western perspective*, akuntabilitas juga menjadi hal yang ramai diperbincangkan. Akuntabilitas menurut Gray, Owen, dan Adam (1996) adalah suatu kewajiban, terkadang dikatakan *typically legal* dan terkadang dikatakan sebagai moral dan hal tersebut muncul dari pertanggungjawaban individu dan organisasi untuk menyediakan “laporan”. Akuntabilitas sebagai *typically legal*, yaitu dengan melakukan dua bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas untuk bertindak dan akuntabilitas untuk menyediakan laporan dari kegiatan mereka. Sedangkan akuntabilitas dikatakan sebagai moral dikarenakan terdapat sebuah norma yang mengikat secara kuat padanya yang erat kaitannya dengan tanggung jawab menyampaikan informasi ke publik yang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tersebut.

Cornwall, Lucas, and Pasteur (2000) dalam Ebrahim (2003a) mengatakan bahwa akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban kepada orang lain dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Kearn (1996) juga mengatakan bahwa akuntabilitas dipandang memiliki tiga dimensi, kewenangan tertinggi kepada siapa, terdapat standar pelaksanaan organisasi, dan tanggapan terhadap cakupan akuntabilitas tersebut.

Konsep akuntabilitas dalam Ebrahim (2003a) disimpulkan dalam tiga perspektif, yaitu *legal perspectives*, *economic perspectives*, and *principal-agent perspectives*. Pada *legal perspectives*, akuntabilitas didefinisikan

sebagai salah satu kewajiban untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan atau kewajiban dalam mengungkapkan informasi yang muncul dari pembentukan standar tersebut.

Dalam *economic perspective*, akuntabilitas mengacu tidak hanya untuk melengkapi bagian dari kepentingan, tetapi juga untuk menemukan keseimbangan antara *competing objectives and interest*. Sedangkan pada *principal-agent perspectives*, akuntabilitas tidak hanya dikaji dalam ilmu ekonomi tetapi juga dalam *political scientists*. *Principal* disini ialah orang yang diberikan amanah oleh si pemberi amanah (*agent*). Sebuah masalah antara *principal* dan *agent* muncul dimana *principal* belum cukup meyakini kepada *agent* terhadap harapan yang *principal* inginkan (Keohane, 2002 dalam Ebrahim, 2003a).

### **2.4.3 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang melibatkan hubungan sesama manusia dan hubungan terhadap Allah SWT. Kajian akuntabilitas juga memperhatikan asas ketuhanan dalam mekanismenya. Dalam konteks Islam, akuntabilitas juga diperoleh dari ucapan/perkataan Allah SWT yang terdapat dalam Al-qur'an dan juga dari perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW.

Konsep akuntabilitas dalam perspektif Islam juga melibatkan konsep tauhid. Konsep dari kepercayaan kepada Allah berarti setiap orang akan

tunduk kepada semua perintah Allah dan mengikuti segala aspek Islam yang tertuang di dalam Al-qur'an. Setiap umat Islam harus mempertanggungjawabkan semua yang telah mereka lakukan (Maali, Casson, & Nappier, 2003). Allah SWT telah menegaskan dalam Al-qur'an, surah An-Nisa;86 agar setiap muslim berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan, dikarenakan semua tindakan yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT di akhirat nanti.

Saad, Azizi, dan Sawandi (2014) dalam Peby (2015) berpendapat bahwa bertanggung jawab kepada Allah berarti bertanggung jawab juga kepada manusia secara tidak langsung, dimana ditegaskan kepada hak masing-masing manusia. Definisi pertanggungjawaban dalam konteks Islam ialah sebuah artian yang sangat jelas ditegaskan untuk bertanggung jawab setiap waktu dan dimanapun berada, dikarenakan itu sebuah perintah dari Allah SWT dan Nabi Muhammad. Konsep akuntabilitas dalam perspektif Islam dapat disimpulkan bahwa selain bertanggung jawab terhadap sesama manusia, juga harus bertanggung jawab kepada Allah, berdasarkan surah yang ada pada Al-qur'an. Hal ini yang dapat membedakan konsep akuntabilitas antara *western perspective* dengan *Islamic perspective*.

Permatasari dan Dewi (2011) dalam Intan (2013) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi Islam antara lain meliputi akuntabilitas kepada Tuhan, akuntabilitas kepada manusia, dan akuntabilitas kepada alam. Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dengan menerapkan

syariah Islam dalam upaya menjaga dan mempertahankan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Sedangkan akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan memberikan laporan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut.

## **2.6. Organisasi Nirlaba**

Organisasi secara umum memiliki pengertian suatu kesatuan dari sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama demi suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang dapat dibagi lagi menjadi tujuan yang bersifat *financial* maupun yang *non financial*. Tujuan dari setiap organisasi menurut (Mahsun, 2006:3): (1) *Pure-Profit Organization* adalah organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan tujuan utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. (2) *Quasi-Profit Organization* adalah organisasi yang bertujuan menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemilik. (3) *Quasi-Non Profit Organization* adalah organisasi yang menyediakan dan menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum sering kali organisasi dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *profit organization* dan *non profit organization*.

Dengan pengelompokan diatas maka organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai *non profit organization*.

Nainggolan (2005:1) memberikan definisi organisasi nirlaba adalah lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Sedangkan menurut Anthony dan Young, dalam Triyuwono (2000:157) memberikan deskripsi bahwa organisasi nirlaba sebagai organisasi yang tujuannya adalah sesuatu diluar menerima keuntungan untuk para pemiliknya, biasanya bertujuan untuk memberi pelayanan. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan, organisasi nirlaba tidak dapat memperoleh modal ekuitas dari para investor luar, kecuali modal ekuitas mereka donasikan.

Menurut PSAK No. 45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2000:45.1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang memberikan bantuan pelayanan kepada publik untuk menyediakan berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan secara sosial, tujuannya bukan untuk meningkatkan laba dimana modal yang didapatkan berasal dari para donatur atau penyumbang lainnya tanpa mengharapkan imbalan.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2000:45,1).

## **2.7. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Menurut PSAK No. 45**

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar ini diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Penerapan PSAK No. 45 berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai 1 Januari 2000. PSAK No. 45 berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut: (a) sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. (b) menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. (c) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis,

dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai: (a) kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan (b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai: (a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. (b) Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain. (c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk: (a) Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. (b) Menilai upaya, kemampuan,

dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. (c) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini: (a) Aktivitas Pendanaan dimana Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (*edowment*). Lalu bunga dan deviden yang dibatasi (b) penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

## **2.8. Pengelolaan Keuangan Masjid**

Menurut Syarifudin (2005) dalam Adi Purnama Yusuf (2012) Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan pencatatan sumber

penerimaan kas, pengeluaran serta pertanggungjawaban penggunaan sumber penerimaan dalam hal ini sumber penerimaan masjid.

Sumber-sumber penerimaan masjid berasal dari sumbangan dari masyarakat dan jamaah dalam bentuk infaq dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jum'at. Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan yang memberikan sumbangan dengan alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti infaq untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain. Sumber keuangan masjid juga diperoleh dari pemerintah daerah, apabila mendapatkan bantuan untuk perbikan gedung masjid (Simanjuntak dan Yeni Januarasi (2011)).

Penerimaan masjid yang bersumber dari penerimaan-penerimaan berupa sumbangan dari masyarakat dan jamaah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masjid baik untuk pengeluaran rutin maupun yang tidak rutin. Pengeluaran rutin berupa pembayaran biaya listrik, PDAM, gaji karyawan dan untuk biaya pemeliharaan bangunan dan fasilitas masjid. Pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut sebagai bentuk akuntabilitas terhadap jamaah karena pengeluaran tersebut untuk digunakan untuk kepentingan jamaah sebagai bentuk pelayanan masjid dan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat dan jamaah masjid.

Selain pengelolaan penerimaan dan penggunaan kas, pengurus masjid perlu melakukan pencatatan laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada jamaah yang secara tidak langsung memberikan amanah kepada pengurus untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Akan tetapi laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid masih sangat sederhana yaitu berbentuk laporan kas, dengan bentuk empat kolom yaitu uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pengawasan pengelolaan masjid dilakukan oleh takmir masjid. Takmir masjid mengelola masjid menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti dalam hal fasilitas masjid yaitu peralatan yang dibutuhkan masjid secara rutin, aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

## **2.9. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud disini adalah kajian terhadap hasil-hasil karya tulis yang relevan dengan penelitian ini. Hasil-hasil penelitian tersebut akan dijadikan rujukan guna melengkapi penelitian ini.

Penelitian mengenai PSAK No. 45 pernah dibahas sebelumnya oleh Fressisca Wulandari (2015) dengan judul "*Penerapan PSAK 45 dalam mengkomunikasikan Aktifitas Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya terhadap Publik*". Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kualitatif dengan hasil Masjid Al-Falah Surabaya telah melakukan penyesuaian dengan penerapan PSAK No.45 tentang pelaporan keuangan Organisasi Nirlaba.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlailah dkk (2014), dengan judul “*Akuntabilitas dan keuangan masjid di kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*” dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan masjid dari keduanya masih tergolong sederhana sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta transparansi dari keuangan masjid yang sebenarnya berbasis kepercayaan antar pengurus dan masyarakat. Sehingga dalam penyajiannya laporan keuangannya masih tergolong sederhana dan apa adanya, sekedar mencatat jumlah kas masuk dan keluar tanpa merincinya.

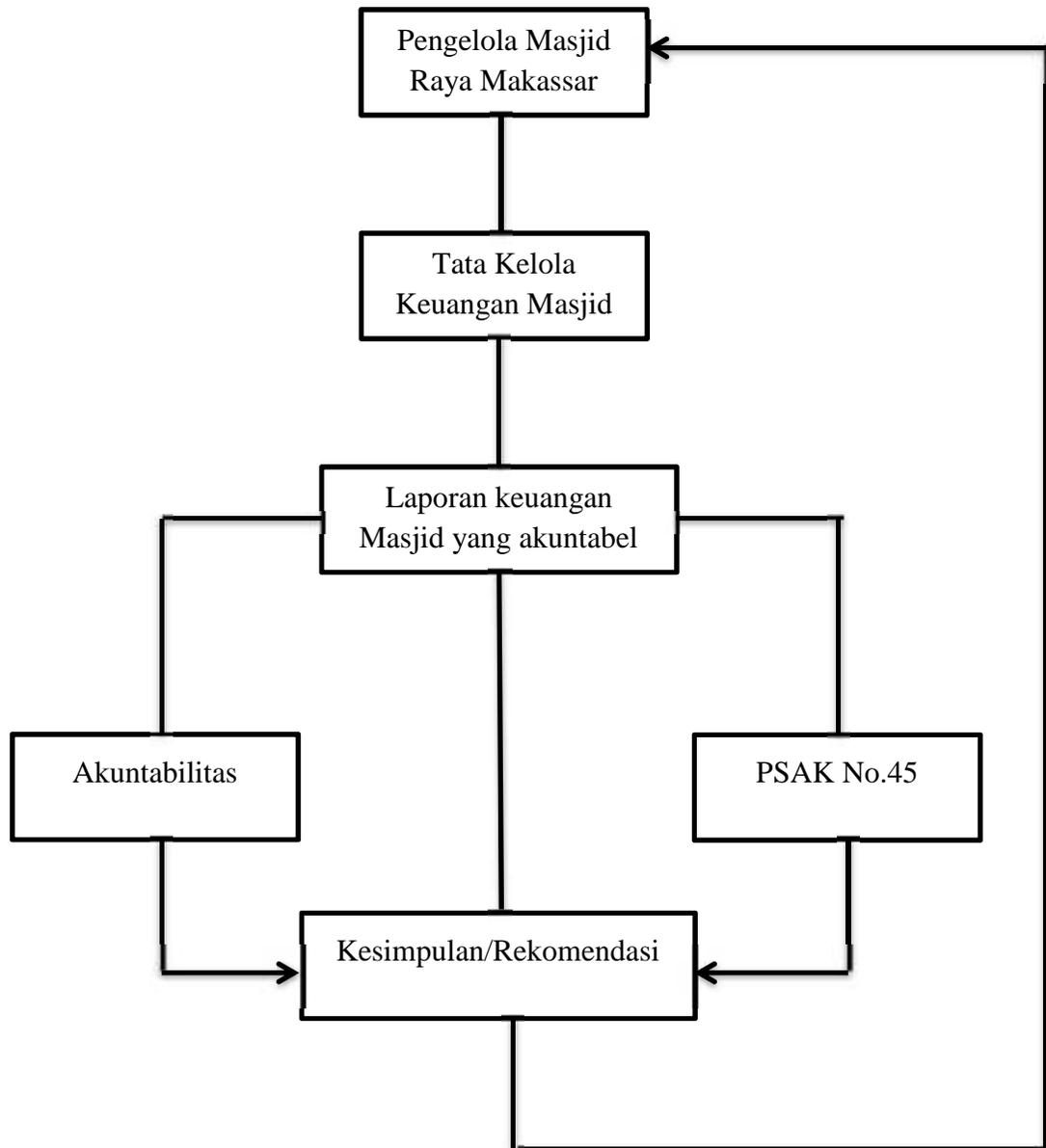
Penelitian yang dilakukan oleh Komang Gede Suriani Suan Dewi dkk (2015) dengan judul konsep “*Akuntabilitas keuangan dalam organisasi keagamaan*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) proses pengelolaan keuangan dilakukan oleh perwakilan masing-masing gereja, yaitu pemangku jawatan, dan pertanggungjawab keuangan disampaikan kepada Kantor Cabang Yoyogyakarta lalu Kantor Pusat Bandung. 2) Akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan keuangan terlaksana dengan baik karena konsep pengelolaan keuangan berbasis teologi melibatkan tenaga profesional.

Penelitian yang dilakukan oleh Roby Hanafi (2015) dalam skripsinya “*Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Nurussyifa’ Surakarta)*” melalui pendekatan metode kualitatif menyebutkan dalam hasil penelitiannya praktek akuntansi yang digunakan di Masjid Nurussyifa’ sangat sederhana namun

para pengurus sangat menjaga amanah yang telah diberikan para jamaah untuk mengelola keuangan masjid dengan baik kepada para pengurus. Walaupun jamaah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal penyampaian dan pencatatannya. Selain itu, aturan hukum dari ajaran islam harus menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas.

#### **2.10. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan landasan teori di atas mengemukakan bahwa Akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid mengacu kepada ketentuan PSAK No. 45 yang akan di teliti dengan menggunakan analisis pendekatan fenomenologi. Berdasarkan uraian diatas gambaran menyeluruh tentang akuntablilitas dan pengelolaan keuangan masjid dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1****Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Masjid Raya Makassar yang bertempat di Jalan Masjid Raya No.57, Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam pengambilan data yaitu sekitar 1 (satu) bulan.

#### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pengurus Masjid Raya Makassar mengenai profil Masjid, susunan organisasi, ruang lingkup kinerja pengurus masjid & pengelolaan keuangan masjid yang disajikan berdasarkan PSAK No.45.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data- data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ini dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang sesuai dengan penelitian melalui pencatatan dan dokumen untuk mendapatkan data yang dapat mendukung penelitian.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh dari informan berupa hasil wawancara, dengan demikian data adalah kalimat yang merupakan pendapat informan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup Masjid. (Moleong, 2000) dalam (Silvia dan Anzar, 2011) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan pemahaman mengenai fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

#### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Makassar serta bagaimana kesesuaian pelaporan keuangannya dengan PSAK 45 dan hal

pendukung lainnya, baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan pengurus masjid.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada dalam hal data diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan. Pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang telah disusun pada masjid agar lebih memahami bagaimana pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid.

### **3.4. Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Emzir (2014) dalam penelitian kualitatif deskriptif data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Metode deskriptif menjelaskan suatu keadaan atau fenomena sesuai dengan realita yang terjadi sehingga tidak diperlukan perumusan hipotesis (Nariasih,2015). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan pada objek penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

#### b. Reduksi Data

Menurut Mile dan Huberman (dalam Emzir 2014) reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan (Nariasih,2015).

#### c. Triangulasi

Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Triangulasi ini selain digunakan mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data (Fatmawati,2013).

#### d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Mile dan Huberman (dalam Emzir 2014) kesimpulan akhir mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Tempat penelitian**

##### **4.1.1 Profil Masjid Raya Makassar**

Masjid Raya Makassar merupakan sebuah masjid yang terletak di Makassar, Indonesia. Masjid ini mengalami renovasi dari tahun 1948 dan selesai pada tahun 1949. Masjid ini mengalami renovasi dari tahun 1999 hingga tahun 2005. Pertama kali dirancang oleh arsitek Muhammad Soebardjo setelah memenangi sayembara yang digelar panitia pembangunan masjid raya. Masjid ini dapat menampung hingga 10.000 jamaah. Masjid dua lantai di Jl. Bulusaraung ini menggunakan bahan bangunan sekitar 80 persen dari bahan baku lokal, memiliki dua menara setinggi 66,66 meter, daya tampung 10.000 jamaah dan fasilitas berupa perpustakaan, kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan.

Masjid Raya Makassar, dibangun di atas lahan lapangan sepak bola Exelsior Makassar seluas 13.912 meter persegi yang dihibahkan untuk pembangunan masjid tersebut. Bangunan awal Masjid Raya Makassar dirancang oleh M Soebardjo dan dibangun pada tanggal 25 Mei 1949. Dana awal pembangunan masjid hanya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diprakarsai K H Ahmad Bone, seorang ulama asal Kabupaten Bone tahun 1947 dengan menunjuk ketua panitia KH Muchtar Lutfi, dua tahun kemudian diresmikan dengan menghabiskan biaya Rp1,2 juta rupiah pada tahun 1949.

Masjid raya kebanggaan muslim Makassar ini menjadi tempat dilaksanakannya untuk pertama kali perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pada tahun 1955 silam. Presiden pertama RI, Ir. Soekarno pernah singgah dan melaksanakan sholat Jumat di masjid ini pada tahun 1957. Sedangkan mantan Presiden Soeharto juga berkunjung dan sholat Jumat di masjid perjuangan ini pada tahun 1967.

Masjid Raya Makassar dirombak total dari bentuk aslinya pada Februari 1999. Saat itu, Ketika Jusuf Kalla melontarkan ide perombakan besar-besaran masjid tersebut, muncul reaksi dengan tudingan sebagai kapitalis murni, dengan tuduhan akan mendirikan plaza di atas lokasi bekas bangunan masjid itu. Namun, seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan masjid sejak peletakan batu pertama oleh Gubernur HZB Palaguna 9 Oktober 1999, maka Jusuf Kalla sebagai pebisnis membuktikan tekadnya untuk memperbaiki bangunan dan model masjid tersebut.

#### **4.1.2 Sejarah Masjid Raya Makassar**

Pada awal pembangunan masjid Raya Makassar, dana yang dikeluarkan oleh K.H Ahmad Bone atau seorang ulama dari Bone mengeluarkan uang sebesar Rp. 60.000. pada tahun 1947 jumlah uang tersebut terbilang lumayan besar, lalu beliau menunjuk KH. Muchtar Lutfi sebagai ketua Panitia dari pembangunan masjid tersebut. Akhirnya pada tahun 1949 masjid ini diresmikan dan jika ditotal seluruh dana yang dikeluarkan mencapai Rp. 1.2 juta.

Masjid Raya Makassar dapat menampung jamaah hingga berkapasitas sekitar 50.000 jamaah. Sebanyak 10.000 jamaah dapat ditampung di bagian bangunan induk atau utama masjid sedangkan sisanya pada halaman masjid. Meskipun pada Agustus 1949 bangunan masjid Raya Makassar ini belum rampung secara keseluruhan, namun antusias para masyarakat disana untuk melaksanakan shalat wajib sangatlah tinggi bahkan melimpah hingga jalan umum karena bagian dalam dan halaman masjid telah penuh.

Pada saat itu pemerintah menganjurkan agar umat muslim disana melaksanakan shalat Jum'at berjamaah di masjid Raya Makassar dan menutup semua masjid lainnya yang ada di Makassar. Pada saat itu tentara KNIL memberikan izin namun akhirnya menyesalinya karena masjid Raya Makassar tidak hanya digunakan untuk melaksanakan shalat berjamaah tetapi juga berfungsi sebagai markas pertemuan dan kegiatan para pejuang di masa itu.

Masjid Raya Makasar juga telah dilakukan renovasi besar-bearan meskipun awalnya banyak dari masyarakat sekitar mengira bahwa renovasi tersebut merupakan sebagai kapitalis. Namun Jusuf Kalla yang saat itu adalah orang yang memiliki ide renovasi masjid meyakinkan bahwa pembangunan ulang masjid itu agar lebih besar dan megah sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Makassar. Akhirnya dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur HZB Palaguna pada tanggal 9 Oktober 1999. Setelah masjid tersebut selesai direnovasi, hasilnya sangat luar biasa. Masjid Raya Agung terlihat sangat megah dengan sentuhan arsitektur Meditaria dan mirip dengan masjid yang berada di Timur Tengah.

Masjid Raya Makassar memiliki dua menara yang ingginya mencapai 66.66 meter. Tak hanya itu saja, sekarang masjid ini dapat menampung para jamaah sebanyak 10.000 jamaah. Tersedia juga beberapa fasilitas untuk para jamaah atau pengunjung, seperti perpustakaan dan juga kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal yang menarik dari masjid ini adalah terdapat koleksi sebuah Al-Qur'an yang sangat besar dengan ukuran 1 x 1.5 meter dan dipajang di bagian lantai 2 yang menjadi daya tarik bagi para jamaah dan pengunjung. Dalam pembuatannya, Al-Qur'an tersebut menggunakan kertas berkualitas dan tulisannya menggunakan campuran tinta Cina dan Air Teh Kental agar tidak luntur.

#### **4.1.3 Arsitektur Masjid Raya Makassar**

Selain sebagai salah satu masjid terindah di kawasan Indonesia Timur, Masjid Raya Makasar juga merupakan saksi bisu sejarah bagi masyarakat Makassar yang pada masa penjajahan selalu dipecah belah menjadi berbagai golongan, aliran, dan organisasi agar tidak bersatu menghimpun kekuatan. Usaha untuk membangun masjid besar yang bisa menampung ribuan jamaah pun selalu dihalang-halangi.

Kekhawatiran penjajah kala itu memang terbukti. Setelah masjid ini digunakan pada Agustus 1949 terjadi sentralisasi kekuatan umat Islam untuk melawan penjajah. Sentralisasi ini dimulai dari bersatunya aktivitas beribadah umat setelah sebelumnya tercerai berai di sejumlah masjid-masjid kecil.

Masjid ini memang sudah didesain besar dan megah sejak awal pendiriannya. Konon seorang jurnalis asing yang mengunjungi masjid ini pada tahun 1949 menulis

bahwa inilah masjid terbesar di di Asia Tenggara saat itu. Bangunan induknya saja dapat menampung hingga 10.000 jamaah dan jika digabung dengan halaman masjid, bahkan dapat mencapai 50.000 jamaah.

Pertama kali dirancang oleh arsitek Muhammad Soebardjo setelah memenangi sayembara yang digelar panitia pembangunan Masjid Raya. Kala itu, Soebardjo menampilkan bentuk menyerupai badan pesawat terbang. Ini terinspirasi dari pengamatannya terhadap masyarakat Makassar yang tengah dihantui ketakutan karena pesawat pengebom B-29 yang selalu melayang-layang di atas kota.

Selang tiga puluh tahun kemudian, Masjid Raya sudah mulai rapuh dan bocor di beberapa bagian, terutama di atap dan kubah. Dari hari ke hari, struktur keseluruhan bangunan semakin terpengaruh. Beberapa kali renovasi parsial sempat dilakukan, namun tidak menghasilkan bangunan yang solid, kokoh, dan optimal.

Terhitung sejak Februari 2009, perombakan besar-besaran atas bangunan masjid ini pun dimulai dengan konsep dasar untuk menjadikan bangunan Masjid Raya Makassar menjadi lebih kokoh, megah, indah, dan modern. Hasil pembaruan itu dapat dinikmati sekarang. Masjid yang megah dan indah ini sekilas mirip dengan masjid dari Timur Tengah karena memiliki sentuhan arsitektur mediteranian.

Dengan kombinasi tiga warna dasar; krem yang mencirikan warna alam (natural) dan cocok dipadukan dengan warna apa saja, hijau yang melambangkan keislaman, serta hitam (warna Kabah), masjid yang 80% bahannya asli Sulawesi Selatan tersebut terlihat sangat asri.

Dari segi konstruksi, Masjid Raya Makassar memanjakan jamaah sehingga dapat menikmati sejuknya udara Makassar. Masjid dirancang terbuka, tak ber dinding layaknya kebanyakan masjid di Makassar dan sekitarnya. Kalaupun ada penghalang, hanyalah tiang baja yang dibungkus dengan batu alam paras Yogyakarta.

Daya tarik lainnya adalah dua buah menara yang masing-masing bertinggi 47 meter (menara lama) dan 66,66 meter (menara baru) pelambang jumlah ayat dalam Kitab Suci Al-Quran. Menara pertama terletak di sebelah kiri bangunan utama, usianya sama dengan Masjid Raya. Adapun menara kedua yang membutuhkan waktu enam bulan dalam proses pengerjaannya, dibuat dengan bahan dasar baja yang membuatnya lentur walau pergerakannya halus sehingga tak kasat mata.

Dari sisi interior, barisan keindahan kaligrafi menghiasi dinding dan langit-langit Masjid Raya Makassar. Kaligrafi itu dibuat oleh Syaharuddin, juara kaligrafi tingkat nasional asal Sulsel. Kaligrafi ini tidak lagi hanya menjadi perekat struktur, melainkan menjadi daya tarik bagi Masjid Raya. Di dalam, tampak mihrab dengan bentuk yang sangat menarik. Bagian atas mihrab seluruhnya berhias Asma'ul Husna. Menurut tim arsiteknya, ini terinspirasi bentuk khas ornamen arsitektur di Cordoba, Spanyol.

#### **4.1.4 Al-qur'an Raksasa di Masjid Raya Makassar**

Masjid Raya Makassar memiliki koleksi sebuah Al-Qur'an besar berukuran 1 x 1,5 meter yang dipajang secara tetap di lantai 2 Masjid. Alqur'an ini senantiasa mendapat perhatian jamaah yang datang beribadah. Bahkan hampir setiap saat

tampak ada jamaah masjid yang berpose di samping Al-Qur'an yang dipajang dalam kotak kayu jati tertutupi kaca tembus pandang tersebut.

Al-Qur'an besar ini merupakan produk ke-6 dari Yayasan Al-Asy'ariah Kalibeyer, Wonosobo, Jawa Tengah. Penulis utama Al-Qur'an ini adalah KH.Ahmad Faqih Muntaha, anak dari penghafal dan penulis kaligrafi terkenal KH.Muntaha Al-Hafidz, pendiri Yayasan Al-Asy'ariah yang mengelola berbagai pendidikan formal, seperti Pondok Pesantren Al-Asy'ariah. Juga pendiri Padepokan Agung tertua di Wonosobo, lembah Pegunungan Dieng.

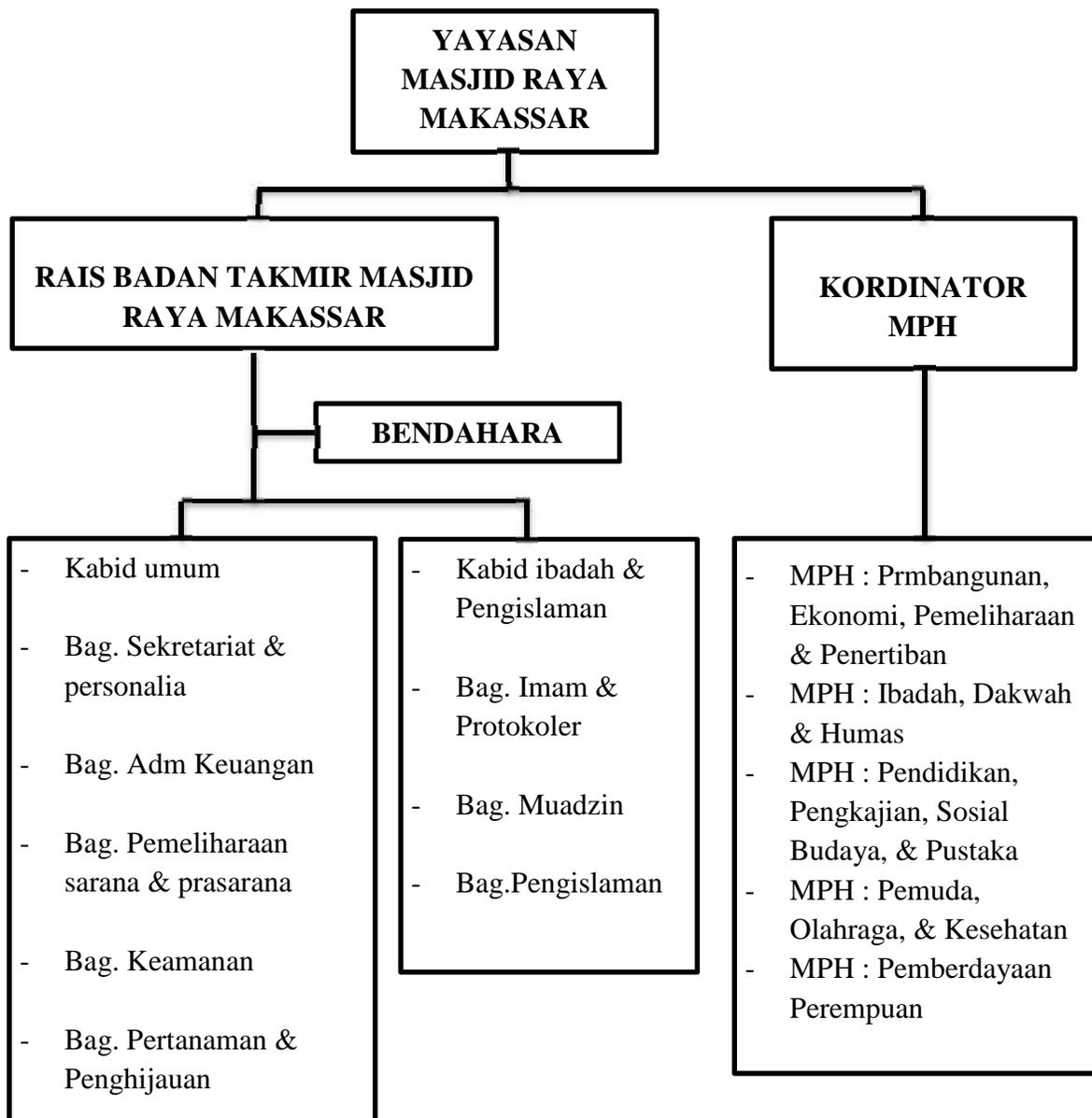
Produk pertama Al-Qur'an besar seperti ini, menurut catatan pihak pengelola Masjid Raya Makassar, diserahkan ke Presiden RI pada 5 Juli 1994. Produk serupa yang kedua disimpan di Istana Negara, Jakarta. Produk ketiga dibuat atas pesanan Gubernur DKI Jakarta, H.Sutioso. Kemudian, keempat, dibuat atas pesanan dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah, H.Murdianto. Produk kelima dibuat atas pesanan Sultan Hasanah Bolkia dari Brunai Darussalam.

Produk Al-Qur'an besar yang dipajang di Masjid Raya Kota Makassar merupakan pesanan dari Pembina Masjid Raya Makassar yang juga pendiri Bosowa Corporation, Drs.H.M.Aksa Mahmud. Al-Qur'an besar dengan 6666 ayat, 114 surah, dan 30 juz tersebut terdiri atas 605 lembar. Menggunakan kertas berkualitas produksi Perum Peruri. Penulisan menggunakan campuran Tinta Cina dan Air Teh kental agar tahan tidak meluntur. Al-Qur'an besar yang pembuatannya hingga selesai memakan waktu satu tahun (12 bulan), berat total termasuk tempatnya 584 kg.

### 1.1.5 Struktur Pengelola Masjid Raya Makassar

Gambar 4.2

Struktur Pengelola Masjid Raya Makassar



Sumber : Pengelola Masjid Raya Makassar, 2006

### 1.1.6 Uraian Kerja Dalam Struktur Organisasi

Uraian kerja dalam struktur organisasi Pengelola Masjid Raya Makassar adalah sebagai berikut :

a. Ketua kordinator Majelis Pengelola Harian (MPH)

Ketua kordinator Majelis Pengelola Harian (MPH) mengkoordinasi:

1. Kordinator MPH
2. Sekretaris MPH
3. Anggota MPH

b. Sekretaris kordinator Majelis Pengelola Harian

Sekretaris kordinator Majelis Pengelola Harian mengkoordinasi:

1. Mengatur pertemuan MPH
2. Mengatur rapat kordinasi MPH
3. Mendampingi para kordinator dalam menjalankan tugas
4. Mengingatkan MPH melakukan rapat periodik

c. Majelis Pengelola Harian

Disingkat MPH, adalah pelaksana harian kegiatan Masjid Raya Makassar terdiri dari MPH pembangunan, ekonomi, pemeliharaan dan penertiban, MPH ibadah, dakwah, dan humas, MPH pendidikan, pengkajian, sosial budaya, dan pustaka, MPH pemuda, olahraga, dan kesehatan, MPH pemberdayaan perempuan.

d. Rais Badan Takmir

Rais Badan Takmir mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengorganisasikan kegiatan masjid.

2. Mewakili masjid dengan baik kedalam maupun keluar.
3. Mengawasi pelaksanaan program kerja.
4. Menandatangani surat-surat penting.
5. Memimpin evaluasi atas pelaksanaan program kerja.
6. Membuat laporan pertanggungjawaban tugas.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Yayasan

e. Kabig Umum

Kepala bagian umum mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu ketua dalam menjalankan program kerja
2. Mengkoordinir dan mengorganisasikan kegiatan bagian sekretariat, personalia, bagian keuangan, bagian pemeliharaan / logistik, bagian kebersihan, bagian pertanaman dan penghijauan, bagian kemandirian dalam menjalankan tugas.
3. Memimpin evaluasi atas pelaksanaan program kerja bagian-bagian.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh yayasan.

f. Kabig ibadah dan pengislaman

Kepala bagian ibadah dan pengislaman mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan aturan khusus bagi Imam, Muadzin, dan Protokol.
2. Menetapkan jadwal Imam dan Muadzin setiap waktu shalat.
3. Menyusun jadwal khatib, penceramah, dan judul ceramah.
4. Mengatur administrasi dan pelaksanaan pengislaman.
5. Mengatur ketertiban dan keamanan jamaah pada waktu shalat.

g. Bendahara Masjid

Bendahara masjid mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengelola anggaran masjid
2. Menyajikan laporan keuangan
3. Bersama ketua / sekretaris yayasan dan rais badan takmir menandatangani surat, bukti kas / bank.
4. Mengefisiensikan operasional anggaran.

h. Bagian sekretariat dan personalia

1. Kabag sekretariat dan personalia

Kepala bagian sekretariat dan personalia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun program kegiatan dibidang kesekretariatan
- b) Penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan, personalia dan perpustakaan.
- c) Menyelenggarakan urusan rumah tangga.
- d) Penyelenggaraan, peningkatan sistem dan prosedur kerja dan penegakan peraturan ketatausahaan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh yayasan.

2. Bagian personalia

Bagian personalia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan administrasi personalia tetap dan petugas yang bekerja di masjid.

b) Melaksanakan penilaian, disiplin, absensi pegawai.

c) Menyusun data kepegawaian.

3. Bagian perpustakaan

Bagian perpustakaan mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Melaksanakan pelayanan, administrasi perpustakaan.

b) Melaksanakan pengelolaan pustaka.

i. Bagian administrasi keuangan

1. Kabag administrasi keuangan

Kepala bagian administrasi keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Mengkoordinir pemasukan / pengeluaran kas.

b) Meminta dan menerima perkiraan anggaran masing-masing MPH.

c) Membina keserasian kerja dengan unsur tata laksana anggaran.

2. Bagian pembukuan

Bagian pembukuan mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menatalaksanakan keuangan masjid sesuai prinsip akuntansi.

b) Meminta laporan kas dari kas untuk dibukukan.

c) Membuat laporan keuangan tepat waktu.

d) Menyimpan dan menjamin keamanan keselamatan berkas pembukuan.

3. Bagian kasir

Bagian kasir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyimpanan dan mengamankan saldo kas dan surat berharga, *brand cash*, dan stempel.
  - b) Mencatat mutasi kas bank tepat waktu dan membuat laporan mutasi kas bank secara teratur lengkap dengan dokumen pendukung.
- j. Bagian pemeliharaan, logistik, dan kebersihan
- 1. Kabag pemeliharaan, logistik, dan kebersihan.

Kepala bagian pemeliharaan, logistik, dan kebersihan mempunyai tugas sebagai berikut:

    - a) Membuat program rehabilitasi dan pemeliharaan masjid.
    - b) Membuat rencana anggaran pemeliharaan, logistik, dan kebersihan.
    - c) Menyusun administrasi, pengadaan, pendistribusian barang.
  - 2. Bagian pemeliharaan

Bagian pemeliharaan mempunyai tugas sebagai berikut:

    - a) Melaksanakan pemeliharaan sesuai program.
    - b) Mendara segala kerusakan sarana / prasarana masjid.
  - 3. Bagian logistik

Bagian logistik mempunyai tugas sebagai berikut:

    - a) Melaksanakan pencatatan, inventaris perlengkapan masjid.
    - b) Melaksanakan urusan perlengkapan masjid.
  - 4. Bagian kebersihan

Bagian kebersihan mempunyai tugas yaitu mengatur kebersihan, keindahan, kenyamanan masjid.

## 5. Bagian teknisi

Bagian teknisi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mengatur pengoprasian dan pemeliharaan *sound system*.
- b) Mengatur pengoprasian dan pemeliharaan listrik.
- c) Mengatur pengoprasian dan pemeliharaan air.
- d) Mengatur pengoprasian dan pemeliharaan eskalator.

## k. Bagian keamanan

Kepala bagian kewananan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan seluruh wilayah masjid.
2. Menjaga seluruh aset masjid.
3. Membuat program kerja keamanan.

## l. Bagian pertanaman dan penghijauan

Bagian pertanaman dan penghijauan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menata dan memelihara semua jenis tanaman yang telah tumbuh.
2. Menanam berbagai jenis tanaman baru pada areal pekarangan yang masih kosong (penghijauan).
3. Memotong rumput dan membersihkan.
4. Kebersihan pekarangan / halaman.

## m. Bagian imam dan protokol

Bagian imam dan protokol mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal dan tugas imam baik shalat lima waktu dan jum'at.
2. Mengatur ketertiban dan kewananan jamaah setiap waktu shalat.

3. Menyusun jadwal kegiatan dakwah harian.
4. Mengumumkan kegiatan-kegiatan masjid dan laporan.
5. Menghubungi penceramah / pendakwah untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

n. Bagian muadzin

Bagian muadzin mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengatur jadwal tugas muadzin pada setiap hari.
2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan bagian muadzin.

o. Bagian pengislaman

Bagian pengislaman mempunyai tugas yaitu mengatur administrasi dan pelaksanaan pengislaman

Nama-nama pengurus MPH (Majelis Pengelola Harian) Masjid Raya Makassar merujuk pada lampiran.

Tabel 4.1

Jumlah Anggota Majelis Pengelola Harian (MPH)

KETERANGAN	JUMLAH
MPH : Pembangunan, Ekonomi, Pemeliharaan & Penertiban	9 orang
MPH : Ibadah, Dakwah & Humas	9 orang
MPH : Pendidikan, Pengkajian, Sosial Budaya & Pustaka	8 orang
MPH : Pemuda, Olahraga, & Kesehatan	9 orang
MPH : Pemberdayaan Perempuan	8 orang

*Sumber : Pengelola Masjid Raya Makassar, 2006*

## **4.2. Deskripsi Data**

### **4.2.1 Deskripsi Informan**

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. H. Ambo Sakka Ambo S.Ag.,M.Ag.

Bapak H. Ambo Sakka Ambo S.Ag.,M.Ag. merupakan Kepala Bagian Kesekretariatan sekaligus Administrasi dan Keuangan yang di rekomendasikan oleh Yayasan Masjid Raya Makassar untuk di wawancarai lebih mendalam sebagai bahan penelitian penulis.

- b. Haeruddin, SE.,MM.

Bapak Haeruddin,SE.,MM. merupakan praktisi akuntan sekaligus dosen di LP3I Makassar. Beliau juga mengajar di STIE Nobel Indonesia Makassar dan khususnya penulis juga sempat di ajar pada masa perkuliahaan.

### **4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada Kepala Bagian Kesekretariatan sekaligus Administrasi dan Keuangan Masjid Raya Makassar dan dosen sekaligus praktisi akuntan yang dilakukan di Mesjid Raya Makassar dan Kampus STIE Nobel Indonesia Makassar.

#### 4.2.2.1 Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Makassar

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Masjid Raya Makassar yang ditanyakan langsung kepada H. Ambo Sakka Ambo S.Ag.,M.Ag. tentang pentingnya pertanggung jawaban untuk pengelolaan keuangan masjid. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Ya, sangat penting dikarenakan seluruh dana keuangan yang kita terima sebagian besar berdasarkan infaq dari ummat yang kita upayakan akan di kelola dengan baik”*

Kemudian peneliti bertanya tentang bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengelola masjid terhadap pelaporan keuangan masjid. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Bentuk pertanggung jawabannya yakni dengan cara melakukan transparansi keuangan artinya seluruh dana yang masuk di masjid ini akan di umumkan kepada ummat secara terbuka. Selain mempertanggung jawabkan diri kita dimata ummat kita juga mempertanggung jawabkan kepada Allah SWT”*

Selanjutnya peneliti bertanya tentang dari mana saja dana di masjid ini. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Dana yang di peroleh sebagian besar dari infaq ummat muslim dan sumbangan ataupun bantuan dari instansi eksternal maupun internal pemerintah”*

Kemudian peneliti bertanya kembali tentang tentang pelaporan keuangan masjid dilakukan dengan cara apa. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Pelaporan keuangan masjid ini dilaporkan pada tiap hari jum’at seluruh dana yang masuk dan keluar akan dilaporkan oleh pengelola masjid kepada ummat muslim ”*

Selanjutnya peneliti bertanya tentang apakah pernah terjadi penyalagunaan keuangan di masjid ini. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Saya rasa penyalagunaan keuangan masjid tidak akan terjadi ketika pengelola masjid ikhlas dan mengharapkan pahala untuk menjalankan amanah dari ummat apalagi dana yang diperoleh pengelola masjid ini hampir sepenuhnya dari ummat dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bersih dari penyalagunaan karena pertanggung jawaban yang saya bilang tadi kepada ummat dan Allah SWT.”*

Kemudian peneliti bertanya kembali tentang tindakan apa yang dilakukan jika terdapat penyalagunaan keuangan. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Tentu segala tindakan yang dilakukan pasti ada proses hukum yang berjalan ketika adanya penyalagunaan. Ya, kita serahkan kepada aturan yang berlaku”*

Selanjutnya peneliti bertanya tentang peningkatan dan untuk mengukur kinerja pengelola masjid apakah perlu diadakan evaluasi kepada pengelola masjid sesuai kinerjanya. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“Ya, pasti perlu. Evaluasi dari pengelola masjid untuk mengukur peningkatan kinerjanya biasa kita lakukan dengan mengadakan pertemuan membahas kekurangan yang selama ini kita kerjakan”*

Kemudian peneliti bertanya kembali tentang evaluasi seperti apa yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja pengelola masjid. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“Paling kita akan mengadakan rapat rutin untuk mengukur kinerja dan juga setiap malam ada kajian rutin untuk menambah wawasan pengelola masjid terkait dengan dakwah pemahaman spiritual yang berdampak kepada prilaku pengelola masjid”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Makassar oleh pengelola masjid dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab kepada ummat dan Allah SWT, transparansi dana, dan evaluasi kinerja pengurus yang penting di lakukan untuk menunjang kinerja pengelola masjid yang akuntabel.

#### **4.2.2.2 Laporan Keuangan Pengelola Masjid Raya Makassar**

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang dipertanggung jawabkan kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kelancaran kegiatan operasional suatu organisasi. Masjid Raya Makassar merupakan organisasi non profit yang juga menggunakan pelaporan keuangan bersumber dari jamaah untuk dipertanggung jawabkan kepada jamaah pula.

Peneliti kembali bertanya kepada H. Ambo Sakka Ambo, S.Ag., M.Ag mengenai kapan periode pembuatan laporan keuangan. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“Periode pembuatan laporan keuangan pengelola Masjid Raya Makassar yakni secara mingguan, kemudian dilaporkan kepada jamaah jumlah penerimaan dan pemasukan secara transparan di tiap jum’at”*

Kemudian peneliti bertanya kembali tentang format laporan keuangan. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Format laporan keuangan pada masjid ini hanya mencatat kas penerimaan dan pemasukan yang diterima dari seluruh donatur-donatur”*

Selanjutnya peneliti bertanya tentang apa saja kendala dalam pembuatan laporan keuangan:

*“sampai saat ini belum ada kendala tentang pembuatan laporan keuangan dan masih berjalan lancar-lancar saja”*

Kemudian peneliti bertanya kembali tentang bagaimana prosedur pengeluaran uang. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“Pengeluaran uang dalam hal pengeluaran kas harus melalui persetujuan Bendahara yayasan dan Ketua yayasan kemudian di informasikan kepada bagian keuangan untuk perintah pengeluaran kas”*

Selanjutnya peneliti bertanya kembali tentang arsip kwitansi atau nota. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Seluruh bukti aktivitas keuangan baik itu kwitansi ataupun nota kita akan simpan sebagai bukti transaksi”*

Kemudian peneliti kembali bertanya tentang siapa pihak yang menyusun format laporan keuangan. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Pihak yang membuat format laporan keuangan pengelola Masjid Raya Makassar yaitu bendahara, bagian keuangan dan bagian pembukuan”*

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa laporan keuangan pengelola Masjid Raya Makassar disusun dengan periode seminggu, untuk menyusun, mengarsipkan bukti transaksi dan melaporkan dengan transparan dengan menggunakan format penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara, bagian keuangan dan pembukuan.

Tabel 4.2

## Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Jum'at ke-2 (02-08 februari 2019)

<b>NO.</b>	<b>PENERIMAAN :</b>		
1.	Hasil Penerimaan Kotak Amal Jum'at lalu	Rp.	15.757.000
2.	Hasil Penerimaan Kotak Amal Harian	Rp.	9.758.000
3.	Sumbangan Yayasan Hadji Kalla	Rp.	261.000.000
4.	Sumbangan Renovasi Masjid	Rp.	500.000
5.	Hasil sumbangan lain-lain	Rp.	2.255.000
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp.	<b><u>289.270.000</u></b>
	<b>PENGELUARAN :</b>		
1.	Biaya Rutin Harian	Rp.	4.300.000
2.	Biaya Renovasi Masjid	Rp.	261.000.000
3.	Biaya Operasional TPA Masjid Raya	Rp.	1.500.000
4.	Biaya lain-lain	Rp.	1.120.000
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	Rp.	267.920.000
	<b>Saldo Awal</b>	Rp.	<b><u>37.828.000</u></b>
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp.	<b><u>59.178.000</u></b>

Sumber : Pengelola Masjid Raya Makassar 2019

#### 4.2.2.3 Organisasi nirlaba dan PSAK No.45

Masjid Raya Makassar dikelola oleh yayasan yang merupakan organisasi nirlaba yang sifatnya non profit yakni untuk kepentingan publik. Peneliti kemudian kembali bertanya kepada H. Ambo Sakka Ambo, S.Ag.,M.Ag. tentang pengetahuan bahwa yayasan masjid merupakan organisasi nirlaba. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“Pengelola Masjid Raya Makassar mengetahui bahwa masjid adalah organisasi nirlaba yang tidak memiliki profit dikarenakan biaya yang masuk dan keluar berdasarkan infaq atau sedekah dari jamaah yang kemudian digunakan untuk kepentingan masjid dan jamaah itu sendiri”*

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai pengetahuan pengelola masjid tentang PSAK No. 45. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“Pengelola Masjid Raya Makassar tidak tahu dan tidak menggunakan PSAK No.45. Pengelola hanya membuat laporan berupa kas masuk dan keluar yang sangat sederhana”*

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa pengelola mengetahui bahwa yayasan Masjid Raya Makassar adalah organisasi nirlaba yang sifatnya non profit tetapi pengelola tidak mengetahui tentang PSAK No.45 pencatatan pelaporan keuangannya masih sangat sederhana dengan mencatat kas masuk dan keluar saja.

#### 4.2.2.4 Pandangan Akuntan Terhadap Organisasi Nirlaba Pada PSAK No.45

Dari sudut pandang akuntan terhadap organisasi nirlaba pada PSAK No.45 maka peneliti melakukan wawancara kepada bapak Haeruddin, SE.,MM. tentang seberapa keharusan organisasi nirlaba untuk menerapkan PSAK No.45. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Organisasi yang berbentuk badan hukum seperti yayasan yang orientiknya non profit maka selayaknya harus menjalankan peraturan bagaimana menjalankan akuntansi nirlaba, tetapi intinya kepentingan akuntansi itu adalah bagaimana menghadirkan bukti dan catatan-catatan. Seperti yang kita tahu di nirlaba itu hanya ada dua sumber dana yakni dana yang diterima dan dana yang dikeluarkan, sepanjang lengkap catatannya dan dilengkapi oleh bukti, kemudian didukung oleh keakuratan tanpa ada kecurangan dan sesuatu yang merugikan yayasan tersebut. Tapi sebaiknya harus dibuat seperti yang di syaratkan dalam PSAK No.45”*

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai seberapa penting penerapan PSAK No.45 terhadap organisasi nirlaba. Beliau menjawab sebagai berikut:

*“ Penting untuk menerapkan PSAK No.45 ini, kita lihat bahwa yayasan yang berbentuk organisasi nirlaba dan memiliki pendapatan yang besar sudah pantasnya untuk menerapkan PSAK No.45 bahkan sudah harus dibuatkan laporan audit setiap tahun dari kantor akuntan nanti kantor akuntan memberikan rekomendasi untuk membuat laporan PSAK No.45 tergantung pengelola yayasan kalau ingin melihat pelaporan keuangannya lebih baik maka setiap tahun di audit*

*oleh kantor akuntan publik kemudian nanti disarankan bahwa harus mengacu kepada akuntansi nirlaba berdasarkan PSAK No.45”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Organisasi yang berbentuk badan hukum seperti yayasan yang orientiknya non profit maka selayaknya harus menjalankan peraturan bagaimana menjalankan akuntansi nirlaba, tetapi intinya kepentingan akuntansi itu adalah bagaimana menghadirkan bukti dan catatan-catatan. Seperti yang kita tahu di nirlaba itu hanya ada dua sumber dana yakni dana yang diterima dan dana yang dikeluarkan, sepanjang lengkap catatannya dan dilengkapi oleh bukti, kemudian didukung oleh keakuratan tanpa ada kecurangan dan sesuatu yang merugikan yayasan tersebut. Tapi sebaiknya harus dibuat seperti yang di syaratkan dalam PSAK No.45 dan penting untuk menerapkan PSAK No.45 ini, kita lihat bahwa yayasan yang berbentuk organisasi nirlaba dan memiliki pendapatan yang besar sudah pantas untuk menerapkan PSAK No.45 bahkan sudah harus dibuatkan laporan audit setiap tahun dari kantor akuntan nanti kantor akuntan memberikan rekomendasi untuk membuat laporan PSAK No.45 tergantung pengelola yayasan kalau ingin melihat pelaporan keuangannya lebih baik maka setiap tahun di audit oleh kantor akuntan publik kemudian nanti disarankan bahwa harus mengacu kepada akuntansi nirlaba berdasarkan PSAK No.45.

### 4.3 Pembahasan

Hasil penelitian diatas menunjukkan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Makassar Berdasarkan PSAK No.45. Penelitian yang dilakukan oleh Roby Hanafi (2015) dalam skripsinya "*Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Nurussyifa' Surakarta)*" melalui pendekatan metode kualitatif menyebutkan dalam hasil penelitiannya praktek akuntansi yang digunakan di Masjid Nurussyifa' sangat sederhana namun para pengurus sangat menjaga amanah yang telah diberikan para jamaah untuk mengelola keuangan masjid dengan baik kepada para pengurus. Walaupun jamaah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal penyampaian dan pencatatannya. Selain itu, aturan hukum dari ajaran islam harus menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas.

Kemudian jika dibandingkan hasil pembahasan dari peneliti yakni dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid raya makassar pada pelaporan keuangan yang disusun dengan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab kepada ummat dan Allah SWT, transparansi dana, dan evaluasi kinerja pengurus yang penting di lakukan untuk menunjang kinerja pengelola masjid yang akuntabel. Laporan keuangan pengelola Masjid Raya Makassar disusun dengan periode seminggu, untuk menyusun, mengarsipkan bukti transaksi dan

melaporkan dengan transparan dengan menggunakan format penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara, bagian keuangan dan pembukuan. Pengelola mengetahui bahwa yayasan Masjid Raya Makassar adalah organisasi nirlaba yang sifatnya non profit tetapi pengelola tidak mengetahui tentang PSAK No.45 pencatatan pelaporan keuangannya masih sangat sederhana dengan mencatat kas masuk dan keluar saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Masjid Raya Makassar PSAK No.45, maka penulis menyimpulkan bahwa:

Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid raya makassar pada pelaporan keuangan yang disusun dengan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab kepada ummat dan Allah SWT, transparansi dana, dan evaluasi kinerja pengurus yang penting di lakukan untuk menunjang kinerja pengelola masjid yang akuntabel. Laporan keuangan pengelola Masjid Raya Makassar disusun dengan periode seminggu, untuk menyusun, mengarsipkan bukti transaksi dan melaporkan dengan transparan dengan menggunakan format penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara, bagian keuangan dan pembukuan. Pengelola mengetahui bahwa yayasan Masjid Raya Makassar adalah organisasi nirlaba yang sifatnya non profit tetapi pengelola tidak mengetahui tentang PSAK No.45 pencatatan pelaporan keuangannya masih sangat sederhana dengan mencatat kas masuk dan keluar saja.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka, penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

Sebaiknya pembuatan laporan keuangan pada Masjid Raya Makassar masih perlu ditingkatkan pada pelaporannya tidak hanya menyusun dan melaporkan dalam kurun waktu seminggu saja tetapi perlu dibuatkan laporan keuangan yang juga periode setiap bulan dan tahun. Pengelola Masjid Raya Makassar dalam pembuatan laporan keuangan sebaiknya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45. Sebagai Yayasan skala besar sebaiknya pengelola Masjid Raya Makassar perlu mengadakan pemeriksaan (audit) oleh kantor akuntan publik untuk mengukur kualitas laporannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Purnama, Yusuf. 2012. Financial Management And Financial Statements Of Great Mosque At-Taqwa Bondowoso (A Case Study of At-Taqwa Great Mosque, Bondowoso). *Jurnal Akuntansi*. 1(2): 1-10.
- Andarsari, Pipit Rosita. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal ekonomi Universitas Kadiri*. Vol. 1, No.2, September 2016: 143-152.
- Andrews, A. 2014. "Downward Account-ability in Unequal Alliances: Explain-ing NGO Responses to Zapatista De-mands." *World Development*, Vol. 54, hlm. 99-113.
- Attouni, M.A.K., dan C.S. Mustaffa. 2014."How do Non-profit Organizations in Libya Adopt and Use Social Media to Communicate with The Society." *Pro-cedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 155, hlm. 92-97.
- Bahri, Syaiful. 2016. pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS, penerbit ANDI, yogyakarta, hal.3
- Baker, C.R. 2014. "Breakdowns of account-ability in the face of natural disasters: The case of Hurricane Katrina." *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 25, No. 7, hlm. 620-632.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ebrahim, A. 2003a. Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development* Vol. 31, No. 5., pp. USA
- Ebrahim, A . 2003b. Making Sense of Accountability: Conceptual Perspective for Northern and Southern Nonprofits. *Nonprofit Management & Leadership*, Vol. 14, No. 2,pp. USA.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fatmawat, Ega. 2013. *Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi Di Depo Arsip Koran Suara Merdeka Antara Sistem Simpan Manual Dengan Foto Repro*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

- Gray, R., Owen, D., dan Adams, C.A. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*, Prentice-Hall, London.
- Halim ,Abdul. *Akuntansi keuangan daerah*, Jakarta: Salemba Empat: 2002
- Hanafi, Roby. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris pada Masjid Nurusy Syifa'Surakarta). Naskah Publikasi.2015.
- Harrison, J.A. dan P. Rouse. 2012. "Account-ability and Performance Measurement: A Stakeholder Perspective." *Journal of CENTRUM Cathedra*, Vol. 5, No. 2, hlm. 243-258.
- Hery. *Teori Akuntansi*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana, 2011
- [Http://daerah.sindonews.com/read/1322931/23/gelapkan-uang-masjid-subiyanto-divonis-2-tahun-6-bulan-penjara-1531913811](http://daerah.sindonews.com/read/1322931/23/gelapkan-uang-masjid-subiyanto-divonis-2-tahun-6-bulan-penjara-1531913811).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2000. *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. DSAK-IAI. Jakarta
- Jacobs,K., dan S. Walker. 2004. Accounting and Accountability in the INOA Community. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 17, No. 3, hlm 361-381
- James, M. Revee, et, al. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat,2009.
- Kearn, Kevin. 1996. *The Strategic Management of Accountability*, 186
- Maali, Bassam., Casson, Peter., dan Napier, Christopher (2003). *Social Reporting by Islamic Banks*. Southampton, UK, University of Southampton, 42pp.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Mashun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Grafindo. Jakarta,

- Mohamed, I. S, N.H.A. Aziz, M.N. Masrek, dan N.M. Daud. 2014. "Mosque Fund Management: Issues on Accountability and Internal Controls." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 145, hlm. 189-194.
- Nainggolam. P. 2005. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. PT. Grafindo. Jakarta.
- Nariasih, Dewi Yibta. 2015. *Laporan Keuangan Masjid berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Masjid XYZ*. Skripsi. Universitas Jember.
- Payer-Longthaler, S. dan M.R.W Hiebl. 2013. "Towards a definition of performance for religious organizations and beyond." *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 10, No. 3/4, hlm. 213-233.
- Pandini, Intan. 2013. Analisis Praktek Akuntabilitas dan Wujud Transparansi di Organisasi Masjid (Studi Kasus pada Masjid Raya Darul Amal Salatiga). Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana
- Peby. 2015. Pengertian dan Macam-Macam Tanggung Jawab. (<https://pebyword.wordpress.com/2015/06/03/pengertian-dan-macam-macam-tanggung-jawab-manusia-dan-tanggung-jawab/>. [online]. diakses tanggal 21 September 2016)
- Randa, Fransiskus., dan Daromes, Fransiskus D. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal Dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Artikel Penelitian. Malang.
- Said, Yulius. 2011. *Masjid Idaman*. Angkasa Raya: Padang
- Samryn. *Pengantar Akuntansi : mudah membuat jurnal dengan pendekatan siklus akuntansi*, Edisi Pertama, Revisi ke-3 Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Setiawan, Kaetum. *Masjid-Masjid Bersejarah di Jakarta*: Erlangga, Jakarta, 2010.
- Simbolon, Anthon. 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Edisi Revisi. PenerbitUGM: Yogyakarta.
- Sucipto, H. 2014. *Memakmurkan Masjid ber-sama JK*. Grafindo Books Media. Jakarta.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. LKiS. Yogyakarta.

Wibowo, Abubakar Arif. *Pengantar Akuntansi II*: PT Grasindo, jl. Palmerah Selatan, 2004

# LAMPIRAN

## **Lampiran 5.1**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA**

#### **MAJELIS PENGELOLA HARIAN (MPH) MASJID RAYA MAKASSAR**

##### **MAJELIS PEMBANGUNAN, EKONOMI, PEMELIHARAAN, DAN PENERTIBAN**

KOORDINATOR	: Ir. H. M. PULU NODE
KETUA	: Ir. H. FURQAN AFFANDI
SEKRETARIS	: Ir. H. SAM'UN SABBE
ANGGOTA	: H. MUKHTAR NURJAYA, SE.,Msi.
ANGGOTA	: Drs. H. ADNAN BINTANG
ANGGOTA	: Ir. H. FAJRUDDIN
ANGGOTA	: Ir. H. ASRI
ANGGOTA	: Drs. AMIR HENDRA
ANGGOTA	: SYARIFUDDIN

##### **MAJELIS IBADAH, DAKWAH DAN HUMAS**

KOORDINATOR	: H. M. ARSYAD DAUD
KETUA	: Dr. H. MUSTAMIN ARSYAD, MA.
SEKRETARIS	: Drs. H. M. ISHAK SAMAD, MA.
ANGGOTA	: Prof. Dr. H. BASIR SYAM, MA.
ANGGOTA	: Drs. H. M. ZAIN IRWANTO, MAg.
ANGGOTA	: Drs. H. M. IDRIS NASIR
ANGGOTA	: H. ABD. RAZAK ASWAN
ANGGOTA	: H. M. IDRIS (ASSHAFA)
ANGGOTA	: H. M. IDRUS

## **Lampiran 5.2**

### **MAJELIS PENDIDIKAN, PENGKAJIAN, SOSIAL BUDAYA DAN PUSTAKA**

KOORDINATOR : Dr. H. M. ARFAH SIDDIQ, MA.  
KETUA : Dr. H. ARIFIN HAMID, MH.  
SEKRETARIS : Drs, H. SYARIFUDDIN ONDENG, MAg.  
ANGGOTA : Dr. H. ABD. KADIR AHMAD, MS.  
ANGGOTA : Dr. H. NAJAMUDDIN HS, MA.  
ANGGOTA : Drs. H. M. NADIR MAJID  
ANGGOTA : H. M. JAFAR LURANG  
ANGGOTA : Drs. M. SYAHRIL, MAg.

### **MAJELIS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN**

KOORDINATOR : Drs. H. MUHAMMAD SAID, MPd.  
KETUA : Drs. H. A. RAHIM MAS P. SANJATA, MAg.  
SEKRETARIS : Drs. H. ABD. MUIS SAID, MPd.  
ANGGOTA : Dr. dr. H. SYAFAR ABDULLAH  
ANGGOTA : AMIRUDDIN AMINULLAH, SAg, MHi.  
ANGGOTA : JAMARUDDIN, MAg.  
ANGGOTA : Drs. AMBO SAKKA, MAg.  
ANGGOTA : H. M. IRFAN SANUSI  
ANGGOTA : UMAR SAID

### **Lampiran 5.3**

#### **MAJELIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

KOORDINATOR : Dra. Hj. FATIMAH KALLA  
KETUA : Dra. Hj, St. ASMAH  
SEKRETARIS : Hj. NURJANNAH ABNA, S.S.,  
ANGGOTA : Dra. Hj. S. NURHUDA TAHIR, MPd.  
ANGGOTA : Dra. Hj. NURAINI ARFAH  
ANGGOTA : Dra. MARYAM ISMAIL  
ANGGOTA : Hj. GANIYAH ABBAS  
ANGGOTA : HERNAWATI

## Lampiran 6

### INFORMAN DAN JADWAL PELAKSANAAN WAWANCARA

<b>NO.</b>	<b>NAMA INFORMAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>TEMPAT</b>
1.	H. Ambo Sakka Ambo, S.Ag.,M.Ag	17 Januari 2019	Masjid Raya Makassar
2.	Haeruddin, SE.,MM	30 Januari 2019	STIE Nobel Indonesia

## Lampiran 7.1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Makassar

NO.	TEMA PERTANYAAN
1.	Apakah akuntabilitas/pertanggung jawaban penting untuk pengelolaan keuangan masjid?
2.	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengelola masjid terhadap pelaporan keuangan masjid?
3.	Dari mana saja sumber dan di masjid ini pak?
4.	Pelaporan keuangan masjid ini dilakukan dengan cara apa?
5.	Apakah pernah terjadi penyalahgunaan keuangan dengan cara apa?
6.	Tindakan apa yang dilakukan jika terdapat penyalagunaan keuangan?
7.	Untuk meningkatkan dan mengukur kinerja pengelola keuangan masjid apakah perlu diadakan evaluasi kepada pengelola masjid sesuai kinerjanya?
8.	Evaluasi seperti apa yang perlu dilakukan guna mengingatkan kinerja pengelola masjid?

#### Laporan Keuangan Pengelola Masjid Raya Makassar

NO.	TEMA PERTANYAAN
1.	Kapan periode pembuatan laporan keuangan?
2.	Bagaimana format laporan keuangan?
3.	Apa saja kendala dalam pembuatan laporan keuangan?
4.	Bagaimana prosedur pengeluaran uang?
5.	Apakah ada arsip,kwitansi atau nota?
6.	Siapa pihak yang menyusun format laporan keuangan?

#### Pengetahuan Tentang Organisasi Nirlaba & PSAK No.45

NO.	TEMA PERTANYAAN
1.	Apakah bapak mengetahui bahwa masjid adalah bagian dari organisasi nirlaba?
2.	Apakah bapak mengetahui tentang PSAK No.45

## Lampiran 7.2

### Pandangan Akuntan Terhadap Organisasi Nirlaba pada PSAK No.45

NO.	TEMA PERTANYAAN
1.	Haruskah Organisasi Nirlaba dalam menerapkan PSAK No.45?
2.	Seberapa penting penerapan PSAK No.45 terhadap Organisasi Nirlaba?

## Lampiran 8

### Data Profil Teknis Masjid Raya

<b>Area Masjid</b>	<b>Fasilitas Masjid</b>	<b>Total biaya Rp.25 M</b>
Luas lokasi 1,7 ha	Perpustakaan di lantai I	Bersumber dari :
Luas lantai I 2.500 m <sup>2</sup>	12x6 m plus toilet	Masyarakat dan jemaah
Luas lantai II 2.500 m <sup>2</sup>	Ruang VIP	Pemda Pemrov Sulsel
Total luas bangunan	Ruang pengelola	Pemda Kota Makassar
10.500 m <sup>2</sup>	Kantor MUI	
Tinggi menara 66,66 m	Tempat wudhu terdiri	
Pucuk kubah 36 m	100 kran (sumur bor)	
Kapasitas daya (listrik)	dengan debit air 110	
140.000 watt	kubik per detik	
Pekerja yang dilibatkan	Kamar mandi yang	
kurang lebih 300 orang	dilengkapi shower plus	
	WC sebanyak 16 buah	

*Sumber : Pengelola Masjid Raya Makassar, 2005.*

## Lampiran 9

### Panitia Awal Pembangunan

#### **Panitia Awal Pembangunan Masjid Raya Makassar Tahun 1947**

1. H Muchtar Luthfi
2. H Lotang
3. Husain daeng nuntung
4. M idris daeng kulle
5. M muchlis
6. Fazal muhammad
7. Sayid ja'far aidid
8. H lala
9. Sultan kaharuddin
10. Andi idjo raja gowa
11. Abd. Hamid daeng magassing (Walikota I)
12. M. Hamelings
13. Malajoang daeng liwang
14. Abd. Waris (Sekda I)
15. Dr J Van Der Zwaal
16. Mr teng tjing leng
17. The peng joe
18. H M. Saleh daeng tikka
19. H Muh. Al bandjar
20. H. Abdul haq
21. Andi hakim
22. H mansur daeng tompo
23. Abd. Rahim muhiddin

24. H Muh. Akib
25. H ahmad bone
26. M. Said effendi
27. M. Danial
28. H mattawang

**Pengawas bangunan**

1. H PH. Van franquemont
2. M. Salim
3. M. Bie
4. M. Arsyad

**Anemer**

Jie Pak Fong

*Sumber : Pengelola Masjid Raya Makassar, 2005.*

## Lampiran 10

### Panitia Pemugaran Masjid

#### Panitia Pemugaran Masjid Raya Makassar Ujung Pandang 1978

1. H. Ahmad Iamo
2. H. M. Dg. Patompo
3. Drs. Abd. Azis gaffar
4. Drs. H. Muhyiddin zain
5. Syamsul rijal, SH
6. K. H. S. Ali ba'dud
7. H. M. Hidjaz yunus, SH
8. M. Idris nashir
9. H. Kalla
10. H. Lotang
11. H. Fadeliluran
12. Drs. H. Umar lakunnu
13. Drs. H. M. Amin situru
14. H. Muhayyng kadir
15. M. Arsyad daud
16. H. M. Ali M. Dg. Tojeng
17. Drs. H. M. Jusuf kalla
18. Drs. H. M. Yasin miyala
19. Ir. Rusdy. Y. O
20. H. A. Ampauleng
21. H. Adam ahmad
22. Abd. Salam amin

**Ujung pandang, 16 juni 1978**

**Drs. H. Muhyiddin zain (KETUM)**

**H. M. Hidjaz yunus, SH (SEKUM)**

*Sumber : Pengelola Masjid Raya Makassar, 2005*

## Lampiran 11

### Panitia Rehabilitasi Masjid

#### Panitia Rehabilitasi Masjid Raya Makassar Ujung Pandang 1998

##### **I. Penasehat :**

1. Gubernur KDH TK I Sulsel
2. Walikotamadya KDH TK II Ujungpandang
3. Kepala Kanwil Depag Prop. Sulsel
4. Ketua MUI Sulsel
5. Drs H M Jusuf Kalla
6. H M Aksa Mahmud
7. Ir. Ahmad kalla

##### **II. Penanggung jawab :**

Pengurus Yayasan Masjid Raya Makassar

##### **III. Pimpinan Harian Panitia :**

Ketua : Drs H A Samad Suhaeb\*  
Wakil ketua : Ir H Pulu Nidoe  
Wakil ketua : Ir H Furqan Affandi  
Sekretaris : H M. Arsyad daud  
Wakil sekretaris : Drs H Muhammad said  
Bendahara : Dra Hj. Ny Fatimah Kalla

##### **IV. Architect, Structure, design supervisor**

Architect : Ir Danny Pomanto  
Structure : Ir Pepen Solihin Jusuf  
Design Supervisor : Ir Furqan Affandi

##### **V. Bidang-bidang**

- A. Bidang dana
- B. Bidang pelaksanaan
- C. Bidang pengawasan
- D. Pembantu umum

\*) Ketika Drs H A Samad Suhaeb wafat pada 2000, KH Sanusi Baco menggantikannya sebagai ketua panitia pembangunan hingga saat ini.

*Sumber : Pengelola Masjid Raya Makassar, 2005.*

# **DOKUMENTASI**



Bapak H.Ambo Sakka Ambo, S.Ag.,M.Ag.

Kepala Bagian Kesekretariatan sekaligus Administrasi dan Keuangan

Masjid Raya Makassar



Bapak Haeruddin, SE.,MM

Praktisi Akuntan sekaligus dosen STIE Nobel Indonesia Makassar



Tampak Bangunan Masjid Raya Makassar



Al-qur'an berukuran 1x1,5 meter besar dengan 6666 ayat, 114 surah, dan 30 juz tersebut terdiri atas 605 lembar.



# YAYASAN MASJID RAYA MAKASSAR

Sekretariat: Jalan Masjid Raya No. 1 Telp. 08124107324  
Makassar, Sulawesi Selatan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KETERANGAN

Nomor **277**/MAS/I/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini pengurus Masjid Raya Makassar menyatakan bahwa atas nama **Adriansyah Ramadhan (2015 221 924)** pada prinsipnya di berikan izin oleh Pengurus Masjid Raya Makassar untuk melaksanakan Penelitian dengan ketentuan bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama penelitian.

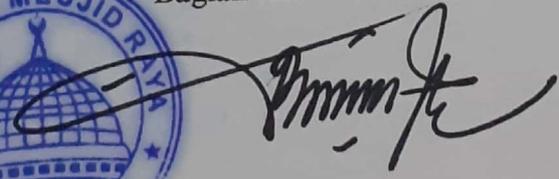
Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2018 M

08 R. Akhir 1440 H

Bagian Kesekretariatan



  
H. Ambo Sakka Ambo, S.Ag., M.Ag.

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Adriansyah Ramadhan  
NIM : 2015221924  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi

### Judul Skripsi :

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No. 45 ( Studi Pada Masjid Raya Makassar )

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 25 Februari 2019

Yang menyatakan,



( Adriansyah Ramadhan )